IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJEHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2019 DI KELURAHAN SIMPASAI KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Sastra Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH :

RAHMAWATI

NIM.215130112

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJEHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIMPASAI KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU

Disusun dan diajukan oleh :

RAHMAWATI
NIM. 216130112

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, 17 Juli 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Ali, M.Si	**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIDN. 0806066801	**NIDN.0816057902**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Studi Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJEHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIMPASAI KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU

Disusun dan diajukan oleh

RAHMAWATI
NIM.216130112

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian Skripsi pada tanggal 03 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M,Si** (PU) (.....)
   NIDN. 0806066801
2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP** (PP) (.....)
   NIDN. 0816057902
3. **Drs. Amil. MM** (PN) (.....)
   NIDN. 0831126204

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmawati

Nim : 216130112

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejehteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis di publikasi orang lain, kecuali secara tertulis tercantum dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanagan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 29, Juli 2020

Penulis

Rahmawati

216130112

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati
NIM : 216130112
Tempat/Tgl Lahir : Dompu 30 Agustus 1998
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 0823 4011 9381
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi program keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Thn 2019 Di kelurahan Simpasai kecamatan Woja kabupaten Dompu

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 08/05/2020

Penulis

METERAI TEMPEL
ED9B6AHF587753412
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rahmawati
NIM. 216130112

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Maja Labo Dahu !!!

Hidup dan tanamkan rasa takut dan malu pada diri anda, karena itu akan membawamu ke jalan yang benar dan mencapai sebuah kesuksesan dunia dan akhirat.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini. Sebagaimana tanda bakti cinta yang tulus penulis persembahkan karya tulis ini kepada Ayahanda dan ibu tercinta, M.Saleh Ahmad dan ST Hadijah yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, membimbing, mengarahkan dan senantiasa memberi dan mendoakan ananda sejak kecil hingga dewasa ini. Penulis berharap semoga skripsi ini merupakan salah satu hadiah terindah bagi beliau. Dan untuk kakakku tersayang Junari Nirwatiansyah dan St Atikah dan seluruh keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini. Yang terakhir saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada dosen yang telah mengajari saya berbagai macam ilmu termaksud pembimbing skripsi Bapak Dr H. Muhammad Ali, M,Si dan Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M,IP penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah ikhlas membimbing sehingga skripsi ini berhasil terbuat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejehteraan Masyarakat di Kelurahan Simpasai Kecamtan Woja Kabupaten Dompu" skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini dengan ketulisan hati yang paling dalam mengucapkan terimakasih begitu besar kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.pd selaku Rektor Universitas muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mhuammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S,IP., M.IP Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. BapakDr. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Ayatullah Hadi, S,IP., M.IP Selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

6. Orang tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
7. Kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berusaha untuk mempersembahkannya skripsi dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Mataram, 07 September 2020

Penulis

Rahmawati

2016130112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN .... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN .... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN .... **v**

MOTTO .... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN .... **vii**

KATA PENGANTAR .... **viii**

DAFTAR ISI .... **ix**

DAFTAR TABEL .... **xiii**

DAFTAR GAMBAR .... **xv**

ABSTRAK .... **xv**

ABSTRACT .... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusa Masalah 4

1.3 Tujuan dan Manfaat Penilitian 5

1.3.1 Tujuan Penelitian 5

1.3.2 Manfaat penelitian..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 6

2.2 Konsep Kebijakan Publik..... 10

2.2.1. Kebijakan Publik 10

2.2.2. Analisis Kebijakan Publik..... 12

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik..... 14

2.4 Program Keluarga Harapan..... 26

2.5 Kesejehteraan Masyarakat 28

2.5.1 Aspek Kesejehteraan Sosial..... 30

2.6 Definisi Konseptual..... 32

2.6.1 Kebijakan Publik..... 32

2.6.2 Analisis Kebijakan Publik..... 32

2.6.3 Implementasi Kebijakan Publik..... 33

2.6.4 Program Keluarga Harapan..... 35

2.7 Definis Operasional..... 37

2.7.1 Dimensi Komunikasi..... 37

2.7.2 Dimensi Sumberdaya 37

2.8 Kerangka Penelitian 38

BAB III METODE PENILITIAN

3.1 Metode Penilitian Kualitatif..... 39

3.2 Lokasi Penilitian 40

3.3 Waktu Penilitian..... 340

3.4 Jenis dan Sumber Data..... 40

3.4.1 Jenis Data 40

3.4.2 Sumber Data..... 40

3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 41

3.5.1 Obsevarsi..... 41

3.5.2 Wawancara..... 42

3.5.3 Dokumentasi 42

3.6 Teknik Pengambilan Sampel/Narasumber..... 43

3.7 Analisis Data Kualitatif..... 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 45

4.1.1 Gambaran Umum Lingkungan Simpasai 45

4.2 Implementasi Pogram Keluarga Harapan Dalam Pendataan Masyarakat Yang Kurang Mampu..... 51

4.2.1 Dimensi Komunikasi 51

4.2.2 Dimensi Sumberdaya 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 67

5.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Kelurahan Simpasai 45

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Simpasai..... 46

Tabel 4.3 Nama Aparatur Kelurahan 48

Tabel 4.4 Mata Pencarian Masyarakat Kelurhan Simpasai 49

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Simpasai 50

Tabel 4.6 Nama Yang Menerima Dana PKH 53

Tabel 4.7 Nama Pengurus PKH Di Kelurahan Simpasai..... 64

Tabel 4.8 Komponen Bantuan PKH..... 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Faktor Penentu Keberhasilan (Edward III) 19

Gambar 4.1 Tampilan Kartu PKH 56

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJEHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIMPASAI KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU

Oleh

Rahmawati

ABSTRAK

Kemiskinan yang dihadapi pemerintah menjadi masalah penting dan memerlukan upaya untuk menanggulangi kemiskinana, dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah memberikan program khusus yang di berinama Program keluarga Harapan (PKH) salah satu program pencampaian penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya di dibidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program PKH dalam upaya meningkatkan kesejehteraan masyarakat miskin di Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.Teknik pengumpulan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability Sampling. Dalam mengungkapkan penelitian ini penulis menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskritif kualitatif yaitu redukasi data, display data dan verivikasi data.

Hasil penelitian dari pelaksanaan program PKH diKelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan 2 dimensi yaitu, pada dimensi komunikasi, proses penyaluran informasi belum efktif dan informasi yang diterima belum jelas, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dan

memahami tentang PKH dan pada sumberdya, pendamping PKH sudah memadai dengan berjumlah satu orang pendamping yang bertanggung jawab atas 588 penerima manfaat bantuan PKH yang menyebabnya kurang optimalisasi implementasi PKH di Kelurahan Simpasai. Namun PKH belum sepenuhnya mensejehterakan masyarakat miskin, dengan adanya PKH belum bisa mengubah kondisi sosial ekonomi.

Kata Kunci: Implementasi, PKH, Kemiskinan, Kesejehteraan

THE IMPLEMENTATION OF FAMILY DEVELOPMENT PROGRAM (PKH) TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE IN SIMPASAI VILLAGE, WOJA- DOMPU DISTRICT

By Rahmawati

ABSTRACT

Poverty is a significant problem faced by the government and requires severe efforts to overcome. To overcome that problem, the government provides a particular program called Family Development (PKH). It is one of the programs to reduce poverty by providing conditional cash transfer to impoverished households to improve the quality of human capital specified health and education service. The purpose of this study was to describe the implementation of the PKH program to improve the welfare of low-income households in Simpasai Village, Woja - Regency. The collection technique used in this study was Nonprobability Sampling. In doing this study, the writer implemented a model developed by Edward III. In addition, to analyze the data, the writer applied descriptive qualitative techniques, namely data reduction, data display, and data verification. The results of this study were based on two dimensions. First, the communication dimension, the information distribution process was not sufficient yet, and the information received was not exact enough. Many people do not understand about PKH and its sources. Second, PKH facilitators have adequate amounting to one companion who responsible for 588 beneficiaries of PKH assistance, which causes the lack of optimization of PKH implementation in Simpasai Village. However, PKH has not fully prospered the poor households, and the existence of PKH has not been able to change social and economic conditions.

Keywords: Implementation, PKH, Poverty, Welfare

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P2B
UNIVERSITAS
NIDN. 0803048601

BAB I

PENDAHULUA

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi di seluruh Provinsi di Indonesia. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejehteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat komplek dan multidimensi.Setiap negara pasti memiliki masalah masing-masing.Tidak terkecuali negara Indonesia.Indonesia memiliki beberapa masalahan di antaranya adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan.Karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah memberikan program khusus yang di beri nama Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan hal tersebut implementasi program keluarga harapan yang terdapat di Kelurahan Simpasai ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Program PKH di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan di harapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambung, setidaknya hingga tahun 2015. Diharapkan imlementasi dari program PKH dapat meningkatkan kesejehteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.Hasil penelitian membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunya mengalami penurunan.

Sementara itu, pemerintah menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan.Masalah kemiskinan berkaitan

dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan,sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainya. Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

Oleh karena itu perlu adanya upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah dibidang sosial ekonomi khususnya adalah kemiskinan.Karena itu pemerintah perlu mengembangngkan strategi untuk mengatasi kemiskinan ini. Penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang di beri nama Program PKH yang dimulai pada tahun 2017.

PKH merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentaskan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan.Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal. Program pengentasan kemiskinan di indonesia saat ini masih terus gencar dilakukan, berbagai macam program pemberdayaan dilaksanakan, hal ini untuk meningkatkan perokonomian masyarakat kearah yang lebih baik.

Hal ini tentu terkait dengan kondisi masyarakat indonesia yang masih berada pada kondisi miskin. Penduduk miskin diIndonesia masih terbilang cukup

tinggi, belum lagi yang tergolong pada rentan kemiskinan.Dengan melihat penduduk miskin yang masih sangat tinggi, perlu adanya program pemberdayaan yang efektif serta keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga penetasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan teratur tanpa ada diskriminasi oleh pihak manapun.

Program pemberdayaan di Indonesia saat ini belum dapat mencerdaskan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan karena program yang bersifat bantuan masih menjadi prioritas utama pemerintahan.Program yang seharusnya bersifat pemberdayakan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menyelesaikan masalah sendiri, khususnya masalah kemiskinan.Saat ini program pemerintahan banyak yang menuai kontrovensi di berbagai lapisan masyarakat, khususnya jenis program yang diluncurkan maupun implementasinya.

Banyak yang menilai bahwa program pemerintah tidak efektif, seperti halnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT yang digagas untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dinilai hanyalah program yang tidak dapat mencerdaskan masyarakat karena program BLT yang langsung memberikan uang tunai tanpa tahu akan diapakan uang tersebut oleh penerima bantuan. BLT tidak berhenti sampai disitu saja, mengenai penggunaan data kemiskinan yang menjadi acuan masih tidak valid, terbukti masih banyak warga miskin tidak tersentuh oleh program ini.

Sebagai penyelenggaraan negara pemerintah wajib menjalankan amanah undang-undang untuk mengentaskan kemiskinan.Usaha-usaha yang di lakukan khususnya pemerintah daerah di tuangkan dalam program-program strategis untuk

menanggulangi kemiskinan. Peran pemerintah sangat berarti dalam mengurangi kemiskinan pada masyarakat terutama di kelurahan simpasai kecamatan woja kabupaten dompu di provinsi NTB karena memiliki kewenangan dan kemampuan dalam hal tersebut. Program-program pembangunan yang mempunyai sasaran penduduk miskin adalaha sangat beragam, baik dari tinjau dari segisektor alokasi anggaran maupun sektor instasi penyelenggaraan pelangksanaan program dan penanggung jawab program.

Penelitian ini di fokuskan kepada implementasikan Program PKH dalam mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat sangat miskin yang membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. program PKH ini harus dilakukan secara profesional sehingga tidak ada lagi rumah tangga sangat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari program PKH tersebut, seharusnya program PKH benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkan sehingga adanya program PKH ini masyarakat akan merasa beban kehidupanya berkurang. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul**" Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejehteraan Masyarakat di Kelurahan Simpasai Kabupaten Dompu**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi Program PKH dalam mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Simpasai Kabupaten Dompu ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penilitian

1.3.1 Tujuan Penilitian

Adapun tujuan dari penilitian ini tidak terlepas dari permasalahan yang dirumuskan yaitu untuk mengetahui implementasi PKH dalam mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Simpasai Kabupaten Dompu.

1.3.2 Manfaat penelitian

Penilitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfat-manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat teroritis

   Hasil penilitian ini dapat memberikan manfaat bagi Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejehteraan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penilitian ini dapat masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

3. Manfaat akademis

   Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik khususnya dalam program PKH dalam meningkatkan kesejehteraan masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penilitian Terdahulu

Penilitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mempercayakan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaanya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan.Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinil. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan beberapa penelitian yang dilakukan penulis, berikut penelitian terdahulu sebagai refrensi:

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Slamet Riyadi (2016)	Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (tesis)	Hasil penelitian menunjukan (1) implementasi PKH di Kecamatan Gunung Sugih tahun 2011 - 2014 meliputi: aspek Input berupa penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) aspek proses berupa kegiatan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok, dan pemutahiran data serta aspek Output berupa Verifikasi Komitmen, dan Penyaluran Bantuan telah berjalan sesuai ketentuan PKH. Salah satu faktor pendukung implementasi	**Persamaan,**peneliti n ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang program keluarga harapan untuk keluarga sangat miskin **Perbedaan,** pada peneilitian ini adalah bagaimana dalam implementasi PKH terhadap keluarga sangat miskin dan

			meliputi; aspek communication berupa dukungan kelembagaan PKH yang telah berjalan efektif, aspek dispotitions berupa kebijakan alokasi dana sharing PKH serta aspek resources berupa komitmen dan kapabilitas implementor program. hambatan implementasi dengan cara penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) akibat sumber data yang tidak akurat. (2) pemutahiran data akibat tidak terpenuhinya sebagian prasyarat administratif, keterlambatan pelaksanaan verifikasi komitmen akibat kinerja oknum petugas pendamping PKH yang kurang optimal.(3) Kualitas PKH dinilai lebih baik jika dibandingkan bantuan langsung lainnya seperti PSKS/BLSM.	menggunakan metode (tesis), sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang dalam upaya untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat**,** dan tidak menggunakan (tesis)
2	Shella Yulia Rosalina (2018)	Pelaksana Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yakni sebagai berikut: 1). Target penetapan sasaran calon penerima PKH. 2). Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan3). Proses persiapan pertemuan awal dan validasi 4). Penyaluran bantuan 5). Pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan 6). Verifikasi komitmen 7). Penangguhan dan pembatalan 8).	**Persamaan,**penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan yang sama dalam mengentaskan kemiskinan. **Perbedaan,**penelitian ini lebih ke analisis bimbingan dan penyeluhan secara islam dengan cara pesan-pesan dakwah terhadap pelaksanaan program PKH dalam mengetaskan kemiskinansedangkan penelitian penulis

			Pemutakhiran data. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, meskipun pencapaiannya belum maksimal.	lebih ke bagaimana meningkatkan kesejehteraan masyarakat
3	Kartiawati (2017)	Analisis Efektifitas Program Keluarga harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam	hasil penelitian dilapangan, efektivitas PKH yang di diukur melalui lima indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalam mengelola/mengalokasikan dana yang diterima. Sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kampug Bonglai karena masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh PKH.	**Persamaan,** Sama-sama membahas tentang program PKH dalam mengentaskan kemiskinan **Perbedaan,** Penelitian ini lebih lebih ke analisis efektifitas program PKH di tinjau dari prospektif ekonomi islam sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana implementasi program PKH dalam upaya meningkatkan kesejehteraan masyarakat.
4	Monica Martilova	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Hasil penelitian menujukkan di Kecamatan Bukit Kemuning PKH sudah berjalan cukup baik dalam artian masih banyak yang harus di perhatiakan dan ditingkatkan dalam mekanisme maupun prosedur yang ada, dilihat dari proses kegiatan pertemuan awal, validasi, pembentukan kelompok, pemutahiran data	**Persamaan,** Sama-sama membhas Implementasi program PKH **Perbedaan,** Penelitian ini lebih membahas tentang faktor penghambat dan mendukung dalam proses implementasi

			verifikasi komitmen peserta dan penyaluran bantuan telah berjalan sesuai ketentuan.	program PKH sedangkan penulis membahas bagaimana implementasi program PKH dalam meningkatkan kesejehteraan masyarakat
5	Syahriani (2016)	Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengetahuan RTSM terhadap PKH bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin telah mengetahui pengertian, tujuan dan kepesertaan PKH. 2) kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng adalah pemberian uang tunai kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk biaya pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin. Pemberian bantuan ini mampu meringankan beban pengeluaran bagi rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin dapat menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun, dan peningkatan kehadiran siswa di sekolah.	**Persamaan,** Penelitian ini dan penulis sama-sama membahas mengenai program PKH untuk meningkatakan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu **Perbedaan,** Penelitian ini membahas mengenai menunjang pendidikan siswa yang kurang mampu sedangkan penelitian membahas keseluruhan masyarakat yang tidak mampu yang berada di keluranhan simpasai kabupaten dompu.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Kebijakan publik

Kebijakan publik dalam definisi yang mansyur dari Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*Maknanya Dye hendak

menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan.Selain Dye James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instasi pemerintah) atau serangkai kata aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Anderson, 1979: 2-3).

Sementara itu Lasswell menginginkan ilmu kebijakan kebijakan publik mencakup (1) metode penilitian proses kebijakan, (2) hasil dari study kebijakan, (3) hasil temuan penilitian yang memberikan kontribusi paling penting memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegensi era kita sekarang (Laswwell, 1951 dalam Parson, 2006: 19).

Selain itu Lasswell juga menggerakan dan mendorong agar para analisis kebijakan menjadi lebih kreatif dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan menjadi lebih kreatif dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan.Analisis kebijakan harus menunjukan rasionalitas dan kreatifitas dalam menciptakan alternatif-alternatif kebijakan.Denga demikian analisis kebijakan harus memiliki banyak metode dan senjata untuk menciptakan kebijakan-kebijakan sebagai solusi masalah publik.Karena itulah menurut Lasswell, ilmu kebijakan adalah harus kontekstual, multimetode dan beroreantasi pada masalah (Lasswell, 1970, Parson, 2006: 20).

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich, 1963 dalam Anderson, 1979-second edition: 2) menjelaskan bahwa:

> Kebijakan memang menjadi ranah yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak.Sehigga, tak heran jika Carl Friedrich pun mendifinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertetu sehubungan dngan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Formulasi kebijakan merupakan proses berlangsung secara rasional dan politis, dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Formulasi kebijakan publik juga melibtkan hal-hal yang kompleks. Ripley (1985: 49) mengungkapkan " bahwa kebijakan mencakup penyusunan agenda pemerintah,formulasi dan legitimasi kebijakan-kebijakan, implementasi kebijakan, tindakan kebijakan, kinerja dan dampak kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, dn kepuasan tentang masa depan kebijakan (keputusan baru)". Ripley sebenarnya menghendaki adanya siklus yang terus menerus dari mulai formulsi – ecaluasi hingga reformulasi kebijakan.Tidak heran jika dalam ranah kebijakan yang terjadi hanya formulasi dan reformulasi kebijakan.Kebijakan pemerintah harus dapat di pertanggung jawabkan kepada publik secara transparan dan partisipatif.Pemerintah harus mampu menyerap informasi yang sebanyak-banyaknya sebelum, selama implementasi kebijakan, dan saat evaluasi kebijakan.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyerap informasi dan aspirasi dari publik dengan melakukan pengukuran indeks kepuasan publik (dalam istilah lain Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM). Hasil pengukuran indeks kepuasan publik ini dapat dijadikan acuandan informasi berharga untuk menentukan kebijakan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

2.2.2 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik merupakan kajian yang tidak tertutup pada kajian di sektor publik saja, karena sektor privat pun pada banyak hal memanfaatkan metode-metode analisis kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan analisis kebijakan lebih lazim dikenal pada sektor publik, yaitu :

Pertama, sekor publik secara nyata memiliki tingkat kompleksitas yang lebih ketimbang sektor privat. Artinya, sektor publik yang terdiri banyak aktor dan kepentingan membutuhkan metode yang lebih lengkap untuk menyelesaikan masalah yang di hadapinya.

Kedua, sektor publik memiliki resiko lebih tinggi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat diprediksi. Artinya aktor publik lebih memiliki kans untuk mendapatkan maslah-masalah baru dari kondisi yang tidak dapat di perdiksi sebelumnya. Kejadian seperti ini lebih dimiliki oleh sektor publik ketimbang sektor privat.

Ketiga, sektor publik memiliki ruang maslah yang lebih luas ketimbang sektor privat. Artinya, pemerintah membutuhkan pertimbangan-pertimbangan

yang lebih memiliki cakupan luas, dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks ketimbang analisis kebijakan yang dimiliki oleh sektor privat.

Analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, mengenali masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik devinisi seperti ini maka analisis kebijakan merupakan kajian yang dapat diadopsi oleh institusi publik maupun privat.

Analisis kebijakan mungkin masih amat jarang disebut sebagai sebuah profesi dinegeri ini.Sebutan analisis kebijakan memang baik jika itu menyebutkan sebuah keahlian yng disandang oleh seseorang.Tetapi, jika maksudnya membangun imej analisis kebijkan adalah sebuah profesi yang harus dihargai dengan uang, maka nampaknya itu telah bertentangan dengan etika dari analisis kebijakan itu sendiri.Analisis kebijakan menginginkan agar rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh klienya tidak bertentangan dengan nila-nilai yang berlaku di masyarakat.

Study kebijakan publik didefinisikan sebagai studi tentang jenis dan karakteristrik, sebab-sebab, dan akubat dari kebijakan publik. Secara sadar studi kebijakan publik bisa dibedakan menjadi 5 tipe yairu, (1) studi tentang sebab-sebab lahirnya kebijakan, (2) studi tentang aktor kebijakan (3) studi implementasi (4) studi evaluasi, dan(5) analisis kebijakan

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus webster yang dikutip oleh Solichin abdul wahab (2004:64) adalah " to provide the means for carrying out (menyedikan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu)" sementara Donald S. Van Metter dan Carl E.Va dalam Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan :

> Policy implementation encompasesses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time eeforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandate by policy deciision.

Dan Mazmanian dan sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan :

> To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activitties that occur after the isuing of outhoritative public policy directives, wich impacts on thepeople and event

Sehingga Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa :

> Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional

yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63) " implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang yaitu, (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana dilapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)". Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada "sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai dan apa alasan menyebabkan keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut". Dari susut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) akan terfokus pada "tindakan pejabat dan intasi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program".

Sementara dari sudut pandang *target groups*, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada "apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola kehidupanya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termaksud pendapatan mereka".Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus.Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadapimplementasi kebijakan publik serta guna

penyerdehanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan menunjukan aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran.Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi di akui sebagai individu / lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan.Kelmpok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah di rencanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan.Outcomes adalah dampak dari kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Fudge dan Barret (1979) yang menyatakan bahwa teori tentang proses implementasi beranja dari sebagian konsep implementasi yang menyatakan bahwa implementasi bukanlah "putting policy into effect" yang menekankan pada pengabaian atas interaksi antara perumus dan pelaksanaaan kebijakan.

Beberapa studi implementasi menunjukan bahwa aktor-aktor dapat melaksanakan kebijakan dengan keyakinan bahwa tindakan mereka adalah sesuai dengan tujuan pengimplementasian walaupun terkadang merek keliru atau melakukan kesalahan. Untuk menyatakan bahwa perspektif implementasi berhasil, diperlukan perspektif implementasi yang berbeda, dan itu adalah teoritis.Tetapi bila dikaji lebih dalam, sebagai koneskuensinya negara kesatuan, meskipun secara deklatoris hanya mengurus urusan seperti diatas, bukan berarti pemerintah melepaskan atau mendelegasikan sepenuhnya urusan lainya kepada pemerintahan daerah.Pemerintah pusat masih memegang kendali kewenang tersebut, khususnya di bidang pengawasan dan pengendalian serta pendanaan.

Seperti isi rumusan pasal 10 ayat (5) UU No 32 tahun 2004 bahwa dalam urusan pemerintah yang terjadi kewenangan pemerintah diluar urusan sebagaimana dirumuskan pada ayat (3), pemerintah dapat : (1) menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintah, (2) melimpahkan sebagai urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah, (3) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah dsa berdasarkan asas tugas pembantuan. Sama seperti UU 22/1999, juga UU No.32/2004, titik beratnya otonomi berada pada kabupaten dan kota adalah menerima kewenanganterbesar, sedangkan provinsi menerima kewenangan yang lebih bersifat koordinatif pengawasan dan pembinaan.

Menurut Agustino (2008:85) bahwa " implementasi mrupakan suatu kajian kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan". Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencampaian tujuan.

Dalamupaya penaggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah.pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan, jika tidak ada ibu maka nenel, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat sumber dana bantuan yang diberikan kepada rumah tangga sasaran berasal dari APBN. Penyaluran bantuan dilakukan empat tahap dalam setahun, yaitu bulan maret, juli, september dan desember.

Pembuatan keputusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidaklah terjadi secara berurutan, artinya proses kedua belum tentu dimulai ketika proses pertama selesai. Selesai proses implementasi berlangsung, proses pembuatan kebijakan (yang lebih operasional) terjadi. Tata niaga cengkeh misalnya, sejak diputuskan untuk dikelola oleh BPPC, diatur melalui berbagaikeputusan menteri yang terus di perbaharui, masing-masing proses imlementasi kebijakan tata niaga tersebut berlangsung. Hal yang sama juga terjadi pada kebijakan pemerintah mengenai iuran TVRI waktu yang lalu.

Menurut Georgi Edward III dalam (Widodo 2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4)struktur birokrasi

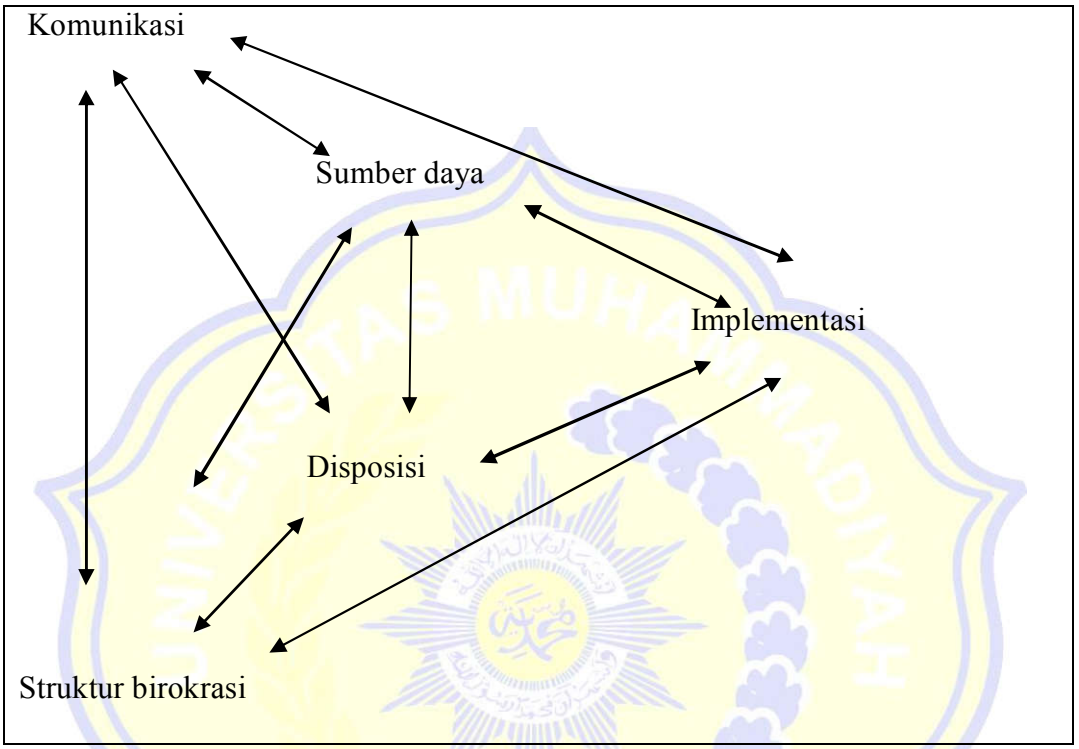

Gambar 2.1. Faktor penentu keberhasilan menurut Edward III

1. Komunikasi

Menurut Edward dalam (Widodo 2010), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission),kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya di sampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lai yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b. Dimensi kejelasan (clarity) Menghendaki agar kebijakan yang ditramisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antaranya mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan,sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efesien.
c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Edward III dalam (Widodo 2010) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam (Widodo 2010) bahwa sumberdaya tersebut

meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanakan kebijakan. Edward III dalam (Widodo 2010) menyatakan bahwa " *probablythe mos essential resources in implementing policy is staff".* Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan " *no matter how clear and consistent implemantation order are and no matter accuratelly the are transmitted, if personel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective.*

b. Sumberdaya anggaran, Edward III dalam (Widodo 2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinta " budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersediamenyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

   Edward III dalam (Widodo 2010:100) menyatakan bahwa "new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the of the program". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implemntor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam (Widodo 2010:1001) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan di pengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumberdaya peralatan, Edward III dalam (Widodo 2010:102) mengatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan saranan yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijkan yang meliputi gedung, tanah, dan saranan yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam (Widodo 2010:102) menyatakan :

> Physical facilities may also be critical resource in implementation. An implementor may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will ot succed.

d. Sumberdaya kewenangan,

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam (Widodo 2010:103) menyatakan bahwa:

> Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.Kewenangan ini menjadi penting

ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan di haruskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam (Widodo 2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk malaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam (Widodo 2010:104) dikatakan sebagai " kemauan, keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward dalam (Widodo 2010:104-105) mengatakan bahwa:

> Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efesien, para pelaksana (implementasor) tidk hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebjakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam (Agustinus 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengakuan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila

personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat lebih atas. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelakasnaan kebijakan haruslah orang-orang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat

b. Insetif merupakan salah satu teknik yng disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi intensif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upayamemenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

4. Struktur Birokrasi

Ripley dan Frankin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menganangi keperluan-keperluan publik (publik affair)

b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierakinya.

c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda

d. Fungsi birokrasiberada dalam lingkungan yang kompleks dan las.

e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidupyang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

f. Birokrakrasi bukan kekuatan yang netraldan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukanya, serta mempunyai keinginan untuk melakukanya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa " implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefesien struktur organisasi:, struktur organisasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup spek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winano (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni. " Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005:150) " Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa :

> SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam car-cara yang lazim dalam suatu organisasi semakin besar pula probalitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2015:155) menjelaskan Bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memelukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:

> Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi gagal besar.Semakin

tersdistorsi dalam pelaksana kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intesif".

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya didalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dasar pelaksanaan PKH yaitu keputusan menteri koordinator bidang kesejehteraan rakyat selaku ketua koordinasi penanggulangan kemiskinan, No : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan"

PKH mulai dilaksanakan di indonesia pada tahun 2007, PKH ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Sasaran dari PKH didalam bidang kesehatan adalah ibu hamil, nifas, memiliki anak balita, anak Pra sekolah, dan para komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sederajat atau yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Menjadi penerima bantuan jadi, pada kartu kepersetaan PKHakan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.

PKH diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek berupa income effect kepada RTSM melalui pengurangan beban ekonomi dalam

jangkapanjang program ini diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antra generasi (pedoman umum PKH, 2006:25).

PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.PKH membererikan bantuan secara tunai kepada RTSM, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait denga upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikn dalam kesehatan.

Tujuan utama dalam PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada pada kelompok masyarakat miskin.Alam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang peningkatan kesejehteraan.

Adapun peningkatan secara khusus, tujuan dari PKH (Pedum PKH 2008, h.12) terdiri dari :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM

UUD 1945 pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara program keluarga harapanadalah salah satu bentuk kehadiran negara dalam melihat fakir miskin dan anak terlantar, memelihara dalam artian luas tidak sekedar menampung mereka dalam satu tempat tapi negara harus hadir memelihara fakir miskin atau anak terlantar. Dengan pendamping dan pemberdayaan.

Landasan hukum pemberian PKH adalah UU no 40 tahun 2002 tentang sistem jaminan sosial UU no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Peraturan presiden no 15 tahun 2010 tentang percepat penanggulangan kemiskinan. Impres no 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan program keluarga harapan. Inpres no 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) sebagai peserta PKH.

2.5 Kesejehteraan Masyarakat

Kata "kesejehteraan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyususnn Kamus, 1991) bersal dari kata "sejahtera" yang berarti aman, sentosa, dan makmur sedangkan pengertian dari kesejehteraan itu sendiri adalah hal atau keadaan aman, damai, sentosa, selamat, kesenangan hidup, dan makmur.

Kesejehteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan

masyarakat. Kesejehteraan dapat di artikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan oarang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya dan ia merasa terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Kesejehteraan masyarakat merupakan tolak ukur perkembangan suatu bangsa.Tingkat kesehatan, pendidikan, perokonomian yang perlu diperhatikan.Program PKH yang dicanangkan oleh pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kesejehteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.Bagi keluarga yang dalam keadaan kurang mampu untuk memenuhu kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang layak menjadi sebuah tantangan besar. Tingginya biaya transportasi, baik peralatan sekolah dan layanan kesehatan sering terlalu tinggi untuk mereka jangkau, terkadang yang menjadi alasan orang tua hanya membeli obat-onatan warung untuk anaknya ketika sedang sakit, namun hal ini justru berakibat pada jumlah kehadiran anak tersebut disekolah karena sakit yang tak kunjung sembuh berdampak pada kinerja anak sehingga memperkecil peluang untuk lulus, yang ada akhirnya membuat mereka terjebak dalam sebuah rantai kemiskinan.

Karena inilah pemerintah melalui Kemensos mengeluarkan sebuah program yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai solusi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM). PKH sendiri merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung tunai kepada RTSM dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan.Program ini sangat mulia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejehteraan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan, meninkatkan kesehatan dan kesehatan dan gizi para peserta PKH sehingga dapat mengurangi beban RTSM dan diharapkn dapat memutus rantai kemiskinan.

Pengerian kesejehteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tetang Kesejehteraan Sosial pasal 1 ayat (1): kesejehteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan maerial, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dapat dipahami bahwa kesejehteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan yang lebih baik dari sebelumnya.

2.5.1 Aspek Kesejehteraan Sosial

1. **Penyandang disabilitas**

   Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyrakat indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya, penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan kedisabilitasnnya dari pihak lain terutama pengasuh dan perawatan dari keluarganya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

anak, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan , dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindunan sosial.

2. Lanjut usia

Berdasarka Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang kesejehteraan lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia60 tahun keatas, secara fisik, lanjut usia dapat dibedakan menjadi lanjut usia potensial maupun lanjut usia tidak potensial. Presentasi lansia semakin meningkat setiap tahunnya, semakin panjangnya usia harapan hidup dapat berimplikasi pada timbulnya permaslahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga permasalahan jumlah lanjut usia terlantar akan cenderung meningkat.

Tingkat kemiskinan ekstriem di Indonesia ditemukan pada penduduk lanjut usia dengan tingkat yang sangat tinggi pada usia yang paling tua sehingga implementasinya diperlukan sinergi lintas sektor dalam penanganan lanjut usia dan penyandang disabilitas miskin berdasarkan status tinggal, Bantuan PKH diberikan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam keluarga.

2.6 Definisi Konseptual

2.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan dari perilaku dari sejumlah aktor seperti pejabat, kelompok, dan instasi pemerintahan atau serangkai kata aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.Pembicaraan tentang kebijakan tidak terlwpas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerinthan maupun masyarakat secara umum.Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyerap informasi dan aspirasi dari publik dengan melakukan pengukuran indeks kepuasan publik.Hasil dari indeks kepuasaan publik ini dapat di jadikan acuan dan informasi berharga untuk menentukan kebijakan peningkatan kualitas kebijakan pelayanan publik.

2.6.2 Analisa Kebijakan Publik

Analisa kebijakan publik adalah sebuah aktifitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, mengenali masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik definisi seperti ini maka analisis kebijakan merupakan kajian yang dapatdi adopsi oleh institusi publik maupun privat. Ada 3 hal yang menyebabkan analisis kebijakan lebih lazim dikenal pada sektor publik , (1) sektor publik secara nyata memiliki tingkat kompleksitas yang lebih ketimbang sektor privat, (2) sektor publik memiliki resiko lebih tinggi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat diprediksi, dan (3) sektor publik memiliki ruang masalah yang lebih luas ketimbang sektor privat.

2.6.3 Implementasi kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan, tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berjasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebiajakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebiajakan, outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Beberapa studi implementasi menunjukan bahwa aktor-aktor dpalat melaksanakan kebijakan dengan keyakinan bahwa tindakan mereka adalah sesuai dengan tujuan pengimplementasian walaupun terkadang mereka keliru atau melakukan kesalahan. Untuk mengatakan bahwa melakukan perspektif implementasi yang berbeda dan itu adalah teoritis tetapi bila dikaji lebih dalam, sebagai konsekuensinya negara kesatuan, meskipun secra dekloratis hanya mengurus urusan seperti diatas, bukan berarti pemerintah melepaskan atau mendelegasikan sepenuhnya urusan lainya kepada pemerintahan daerah pemerintah pusat masih memegang kembali kewenang tersebut, khususnya dibidang pengawasan pengendalian serta pengendalian.

a. Komunikasi

Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuandan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan, konsenstensi (consentency).

b. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104), dikatakan sebagai "kemauan, keingingan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159:160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari : (1) pengakuan birokrasi dan (2) isentif,

c. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplemasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukanya serta mempunyai keinginan untuk melakukanya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti

strukur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

d. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.Menurut Edward dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan.Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan.

2.6.4 Implementasi Program Keluarga Harapan

Suatu peogram pencepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberi bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin didalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.PKH diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengurangan beban ekonomi dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinanantar generasi.

2.6.5 Kesejehteraan Masyarakat

Kesejehteraan masyarakat merupakan tolak ukur perkembangan suatu bangsa.Tingkat kesehatan, pendidikan, perokonomian yang perlu diperhatikan.Program PKH yang dicanangkan oleh pemerintah

mempunyai pengaruh terhadap kesejehteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.Bagi keluarga yang dalam keadaan kurang mampu untuk memenuhu kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang layak menjadi sebuah tantangan besar. Tingginya biaya transportasi, baik peralatan sekolah dan layanan kesehatan sering terlalu tinggi untuk mereka jangkau, terkadang yang menjadi alasan orang tua hanya membeli obat-onatan warung untuk anaknya ketika sedang sakit, namun hal ini justru berakibat pada jumlah kehadiran anak tersebut disekolah karena sakit yang tak kunjung sembuh berdampak pada kinerja anak sehingga memperkecil peluang untuk lulus, yang ada akhirnya membuat mereka terjebak dalam sebuah rantai kemiskinan.

2.7 Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah **Komunikasi**dan **Sumberdaya** yang terdiri dari beberapa dimensisebagai berikut :

2.7.1 Dimensi Komunikasi

1. Dimensi Transmisi

a. Ketepatan kelompok sasaran

b. Pihak berkepentingan

2. Dimensi kejelasan

a. Kejelasan tujuan

b. Efektifitas kebijakan

3. Dimensi konsistensi

a. Keberlanjutan

2.7.2 Dimensi Sumberdaya

1. Sumberdaya Manusia

a. Mempengaruhi keberhasilan

2. Sumberdaya Anggaran

a. Keterbatasan anggaran

2.8 Kerangka Penelitian

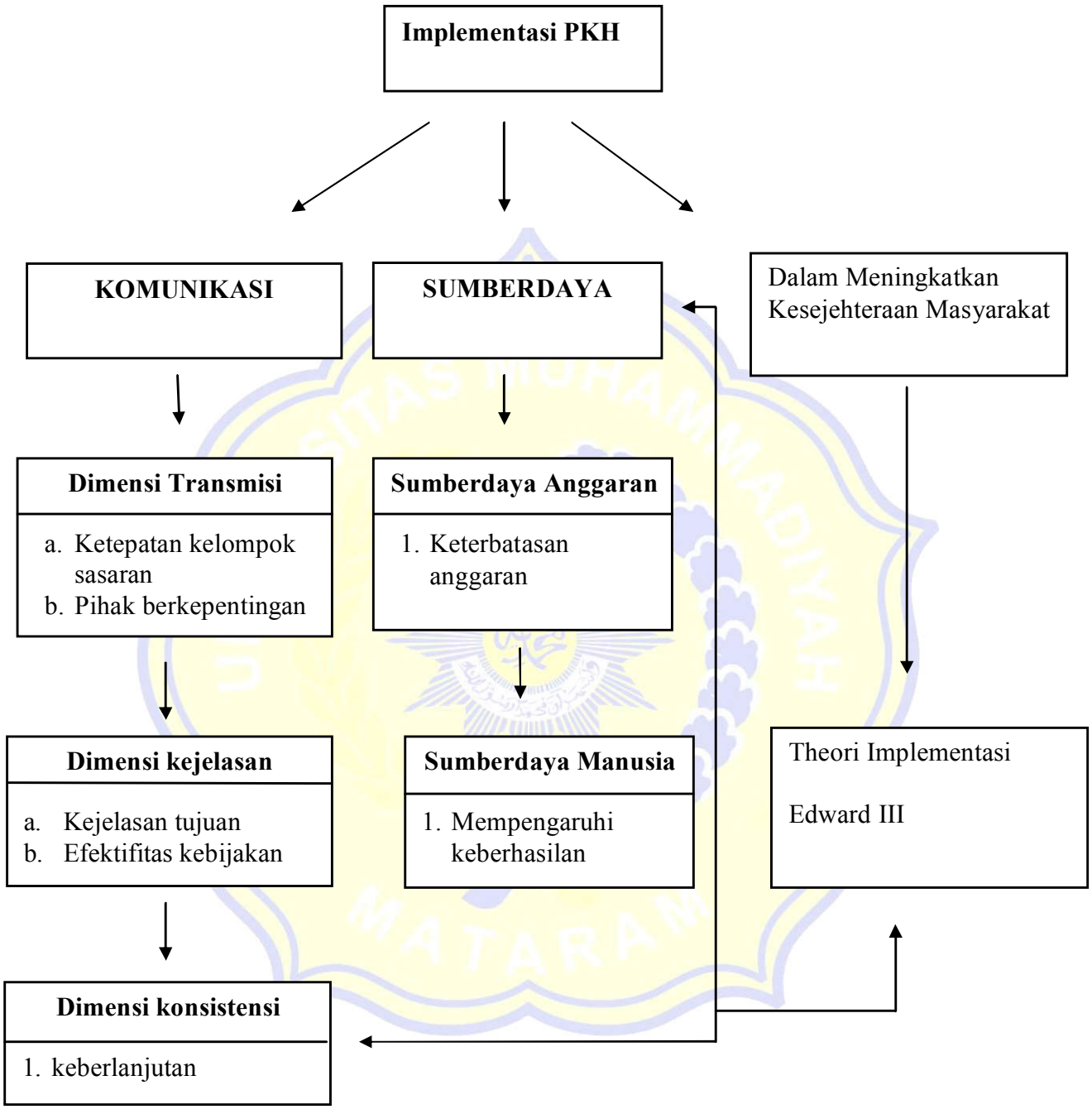

Sumber : Edward III (dalam Widodo (2010)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian nutarilistik karena penilitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penilitian yang digunakan untuk meniliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana penilitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penilitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasia.

Kriteria data dalam penilitian kualitatif adalah data yang pasti.Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.Pengumpulan data dengan obsevarsi dan wawancara yang menghasilkan data berbeda maka data tersebut belum pasti.Bila data yang diperoleh masih diragukan, dan terus belum memperoleh kepastian, maka penilitian masih harus dilanjutkan.Jadi pengumpulan data dengan teknik trianggulasi adalah pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan

berbagai teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga dapat diperoleh data yang pasti.

3.2 Lokasi Penilitian

Penilitian dilakukan di Kelurahan Simpasai Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

3.3 Waktu Penilitian

Waktu penilitian berlangsung selama kurang lebih 3 minggu dimulai pada bulan januari sampai bulan febuari tahun 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Data memiliki beberapa ciri yang dapat dikalfikasikan menurut kekhususan tertentu, sesuai dengan maksud penilitian ataupun sumber data yang digunakan oleh karenanya data dapat di klarifikasikan

3.4.2 Sumber Data

1. **Data primer**

   Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.Data primer ini yang di ambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.Kalau seoeang penelti meniliti pengaruh program keluarga berencana terhadap keharmonisan kehidupan keluarga, kemudian mengambil data tersebut langsung kepada peserta atau pasangan suami istri yang mengikuti program keluarga berencana, maka sesungguhnya peniliti tersebut telah menggnakan data primer. Begitupula kalo seseorang peneliti mendapat

data korban pemerkosaan dari si korban berarti dta tersebut adalah data primer

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.Contoh, data sekunder di atas, maka petugas pertanian lapangan (PPL) adalah sebagai sumber data sekunder.

Karena sesuatu dan lain hal, penelitian tidak atau sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan mungkin juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Begitupula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keteragan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.

3.5 Teknik pengumpulan data

3.5.1 Obsevarsi

Nasution (1998) menyatakan bahwa, obsevarsi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui obsevarsi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di obsevarsi dengan jelas.

Marshall (1995) menyatakan bahwa " *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior".* Melalui obsevarsi, penilitian belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

3.5.2 Wawancara

Esterberg (2002) mendifinisikan interview sebagai berikut. "*a meeting of two persons to exchange information and idea thourgh question and responses, resulting in communication and joint conscrution of meaning about a particular topic".* Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, seingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penilitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.Teknik pengumpulan data ini mendasarkn diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa *interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained thorough observation alon*. Jadi dengan wawancara maka penilitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui obsevarsi.

3.5.3. Dokumentasi

Merupakan suatu metode pengumpulan data berupa catatan yang dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi.Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi, dokumentasi bisa tertulis maupun lainya yang bisa memberikan informasitentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota semarang.

3.6 Teknik Pengambilan Informan

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sample. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penilitian,teknik sampling yang digunkan yaitu Nonprobability Sampling merupakan teknik pengambilan sample yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Teknik sample ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball* Jadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu :

a. Ketua PKH (satu orang)
b. Sekertaris PKH (satu orang)
c. Bagian Kasra (satu orang)
d. Kepala Desa (satu orang)
e. Masyarakat sebagai sasaran PKH (5 orang) dengan cara persebaran dan tidak terpaku pada satu dusun/RT dalam kelurahan simpasai.

Jadi jumlah narasumber di penelitian ini adalah 9 orang

3.7 Analisis Data Kualitatif

Analisisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antara konsep (variabel) yang sedaang diteliti.Tujuannya ialah peneliti mendapatkan makna hubungan konsepsional (variabel-variabel) sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalahyang dirumuskan dalam penilitian.Hubungan antarsemantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif.